

Contending Images of World Politics: Penelusuran Kritis terhadap Asal-Usul dan Perdebatan Mengenai Konsep 'De- veloping Countries'

Dafri Agussalim

Universitas Gadjah Mada

Jl. Sosio Yustisia, Bulaksumur, Yogyakarta 55281, Indonesia

dafri@ugm.ac.id

Diserahkan: 2 Juni 2019; diterima: 12 Juli 2019

Abstract

This article is a critical tracer study of genealogy and development, including debates on the concepts and terminology of developing countries. By applying constructivism perspective, it aims to explain the meaning, categories, and criteria, the emergence and development of the idea, and the reason why these concepts and ideas have been changing from time to time. This article argues that the ontological existence (concepts and ideas) of the developing countries is the result of construction of agents both foreign countries—especially the western—and developing countries themselves. Therefore, the conceptualization of developing countries is inseparable from values and (self) interest of each country, whether it is political, ideological, or economical. As a result, there must be possibilities of inconsistency from the agent in making categorization. This inconsistency is influenced by the changing of identity, world view, interests, and policies of the agents as an impact of geopolitical and geostrategic change in the world after Cold War. The significant economic and political development which has been experienced by some developing countries and the increasing of economic and political problems faced by some developed countries has forced the agents to reconceptualized their identity, interest, and foreign policy toward what so-called developing countries. Keywords: developing countries, concept and ideas, identity, interest, agents.

Abstrak

Artikel ini merupakan studi penelusuran kritis tentang genealogi dan perkembangan, termasuk perdebatan, konsep, dan terminologi 'negara-negara berkembang'. Dari sudut pandang konstruktivisme, tulisan ini bertujuan menjelaskan makna, kategori, kriteria, kemunculan dan perkembangan gagasan, serta alasan mengapa konsep ini berubah dari waktu ke waktu. Argumen yang ingin disampaikan dalam artikel ini adalah keberadaan ontologis (konsep dan ide) negara-negara berkembang merupakan hasil konstruksi agen atau aktor, baik negara asing—terutama negara barat—dan negara berkembang itu sendiri. Karena itu, konseptualisasi negara-negara berkembang tidak terlepas dari nilai dan kepentingan (pribadi) masing-masing negara, baik itu kepentingan politik, ideologi, atau ekonomi. Akibatnya, kemungkinan inkonsistensi dari agen dalam mengategorikan suatu negara sebagai negara berkembang sangat mungkin terjadi. Ketidakkonsistenan ini dipengaruhi oleh perubahan identitas, pandangan dunia, kepentingan, dan kebijakan para agen sebagai dampak dari perubahan geopolitik dan geostrategis dunia pasca Perang Dingin. Perkembangan ekonomi dan politik signifikan yang telah dialami oleh beberapa negara berkembang, dan peningkatan masalah ekonomi dan politik yang telah dihadapi oleh beberapa negara maju, memaksa agen untuk mengonstruksi ulang konsep negara-negara berkembang berdasarkan identitas, minat, serta kebijakan luar negeri mereka. Kata kunci: negara berkembang, konsep dan ide, identitas, kepentingan, agen.

PENDAHULUAN

Salah satu fenomena menarik tentang negara-negara ini disebut sebagai dunia ketiga (*third world*). Lalu pada berkembang (*developing countries*) yaitu intensitas perubahan tahun 1970-an, terminologi tersebut berubah menjadi pada penggunaan konsep dan terminologinya dari waktu negara-negara terbelakang (*underdeveloped countries*). Sejak ke waktu. Pada tahun 1950-an, negara-negara berkembang tahun 1970-an akhir, penyebutan negara-negara tersebut

berubah menjadi negara berkembang (*developing countries*). Kelompok negara-negara ini juga terkadang disebut *negara-negara selatan* atau negara kurang maju (*least developed countries*), selanjutnya berubah kembali menjadi *developing countries* sampai akhirnya sekarang ini disebut sebagai *global south*. Pertanyaannya adalah mengapa dan bagaimana perubahan-perubahan penyebutan dan pengelompokan tersebut terjadi?

Kajian tentang negara-negara berkembang di Indonesia telah mengalami kemajuan pesat sejak berakhirnya Perang Dunia II sampai saat ini, baik secara kuantitas maupun kualitas. Cakupan kajian mengenai topik ini meluas, bukan saja meliputi aspek politik, ekonomi, keamanan, sosial, dan budaya, tetapi juga mencakup aspek konflik dan kerja sama, baik antarnegara berkembang maupun dalam kaitannya dengan negara-negara maju, khususnya negara-negara barat. Walaupun demikian, jika diteliti secara seksama, kebanyakan kajian-kajian tersebut berangkat dari premis yang sama, yaitu secara ontologis keberadaan negara-negara berkembang adalah sesuatu yang terberi. Di Indonesia, konsep negara-negara berkembang seolah diterima tanpa ada pertanyaan kritis dan lebih dalam. Misalnya, apa yang dimaksud dengan negara-negara berkembang, apa kriteria yang dipakai untuk mengategorikan suatu negara dalam kelompok negara-negara berkembang, kapan konsep dan ide tersebut muncul, bagaimana perkembangannya dalam wacana masyarakat dunia, serta, yang lebih penting, mengapa konsep dan ide tersebut ada atau diadakan serta berubah dari waktu ke waktu.

Tulisan ini bertujuan untuk mengevaluasi keberadaan konsep dan ide 'negara-negara berkembang' yang selama ini secara ontologis dianggap sebagai hal yang terberi. Dengan melihat konsep dan ide ini sebagai hasil konstruksi para agen atau aktornya, menjadi sesuatu yang relevan bahwa penyebutan terminologi dan pengklasifikasian serta pengonseptualisasian negara-negara berkembang tersebut tidak lepas dari nilai-nilai dan kepentingan masing-masing negara. Dengan demikian, dapat memunculkan potensi baru akan perubahan perwajahan politik internasional sekaligus potensi pembangunan yang lebih adil dan perdamaian positif bagi keseluruhan umat manusia.

METODE RISET

Tujuan tulisan ini tidak hanya menggambarkan (*to describe*) tetapi juga untuk menjelaskan (*to explain*), maka metode analisis dan penyajian data menggunakan gabungan dari dua metode yaitu dengan mendeskripsikan dan menjelaskan. Dengan kata lain penelitian ini bersifat *descriptive-explanative*. Deskripsi digunakan untuk menggambarkan *what is the case*. Sedangkan eksplanasi fokus pada *why something in the case* (Punch, 2005). Dalam proses eksplanasi untuk menganalisis ada tidaknya hubungan kausalitas antara variabel independen dan variabel dependen, maka digunakan metode *interpretive analytic* dengan logika berpikir *inductive*. Yang dimaksud dengan proses interpretasi (*interpretation*) adalah "*a process of creating or assigning significant and coherent meaning in specific setting*" dari data-data yang diteliti. Data-data yang ada diinterpretasikan dengan cara memberi makna dan arti, diterjemahkan sehingga dapat dimengerti. Interpretasi ini dilakukan untuk menemukan bagaimana agen atau aktor yang sedang dikaji melihat dunia, bagaimana mereka mendefinisikan atau mengonstruksikan situasi, dan apa artinya semua itu bagi mereka (Newman, 2005).

KERANGKA PEMIKIRAN

Konstruktivisme merupakan perspektif paling relevan untuk menganalisis dan menjelaskan alasan-alasan di balik keberadaan, perkembangan, dan perubahan konsep negara-negara berkembang (Jackson, 2007). Menurut pandangan kaum konstruktivis, politik internasional dibentuk dan dikendalikan oleh ide-ide, norma-norma, konsepsi-konsepsi, nilai-nilai, dan asumsi-asumsi yang dimiliki secara bersama-sama oleh para aktornya (Eby Hara, 2011). Seperti dikatakan oleh Robert Jackson dan Georg Sorensen, "*the key idea of constructivism is that the social world including international relations is human construction*" (Jackson & Sorensen, 1999: 238). Menurut Fierke, yang dimaksud dengan mengonstruksi adalah "*...an act which brings into being a subject or object that otherwise would not exist*" (Fierke, 2007: 168).

Dengan kata lain, realitas politik internasional, termasuk keberadaan negara-negara berkembang (dan juga negara-negara maju), pada dasarnya hasil konstruksi secara sosial oleh para agen dan aktor melalui proses belajar, pemahaman bersama (*intersubjective*), dan saling

memengaruhi. Seperti dikatakan oleh Jennifer Sterling Folker, "*constructivism shows that even our most enduring institutions are based on collective understanding*" (Folker, 2003: 118). Ini artinya eksistensi konsep negara-negara berkembang dan negara-negara maju bukanlah merupakan hasil pengklasifikasian berdasarkan material atau fisik, sebagai realitas sosial hasil konstruksi para aktornya (Jackson, 2007).

Keberadaan objek material seperti senjata, misalnya, tidak begitu saja ada secara alamiah, tetapi ia merupakan hasil ciptaan manusia melalui proses pemaknaan (dikonstruksikan). Sekali benda tersebut dikonstruksikan, maka ia memiliki arti atau makna khusus dan digunakan dalam konteks yang melibatkan nilai, norma, dan asumsi sosial.

Terbentuknya konstruksi terhadap negara-negara berkembang dan negara-negara maju tersebut berkaitan erat dengan identitas negara-negara berkembang dan negara-negara maju itu sendiri. Hal ini karena identitas merupakan faktor paling mendasar yang menentukan konstruksi negara-negara maju terhadap suatu atau beberapa negara-negara berkembang atau sebaliknya dan juga konstruksi negara-negara berkembang terhadap diri mereka sendiri, yang pada akhirnya menentukan perilaku negara-negara tersebut dalam politik internasional. Identitas negara-negara tersebut terbentuk melalui pemahaman bersama terhadap ide-ide, pemikiran, kepercayaan yang mereka miliki. Dalam bahasa Alexander Wendt, identitas dan kepentingan merupakan hasil proses sosial, berupa proses intersubjektif (*intersubjective processes*) (Wendt, 1999).

Menurut kaum konstruktivis, walaupun kepentingan material itu diakui penting namun kepentingan tersebut harus dilihat sebagai fungsi dari identitas aktor atau agen. Identitas dan kepentingan saling berkaitan erat dan oleh karenanya tidak dapat dipisahkan dalam usaha memahami fenomena politik internasional. Sebagai contoh, identitas sebagai negara demokrasi liberal tidak dapat dipisahkan dari kepentingan untuk mematuhi norma-norma hak asasi manusia (Fierke, 2007). Dalam konteks ini, kaum konstruktivis berargumen bahwa identitas dan kepentingan dikonstruksi berdasarkan proses belajar dari pengalaman masa lampau, apa yang sedang dialami sekarang dan harapan yang ingin dicapai di masa depan.

Lebih lanjut, mengikuti cara berpikir kaum konstruktivis, sebagai fakta sosial yang fundamental, individual atau negara tidak dapat dipisahkan dari konteks norma-norma dan nilai-nilai yang membentuk mereka, termasuk hambatan dan peluang yang diciptakannya. Akan tetapi, berbeda dengan rasionalis yang melihat bahwa struktur sebagai fungsi dari kompetisi dan distribusi kapabilitas material (*hard power*), dan struktur berfungsi sebagai penghambat perilaku negara, dan bahwa tindakan suatu negara selalu bersifat rasional (memaksimalkan pencapaian kepentingan nasionalnya), konstruktivis lebih fokus pada norma-norma dan *share understanding of legitimate behaviour*, walaupun diakui bahwa faktor material tetap memainkan peran penting (Fierke, 2007). Seperti dikatakan oleh Frank Schimmelfennig:

... identities, interests, and preferences of actors are products of intersubjective social structures, such as culture, institutions, and social interaction. It is not merely the cost-benefit analysis that determines an actor's behavior, but rather their values and norms, and standards of legitimacy—in other words, a logic of appropriateness (Schimmelfennig dalam Fierke, 2007: 179).

Menurut pandangan ini, "what is rational is a function of legitimacy, defined by shared values and norms within institutions or other social structures rather than purely individual interests" (Fierke, 2007: 70).

Dalam konteks tulisan ini, norma-norma dan nilai-nilai tersebut di atas tidak dilihat hanya sebagai penghambat perilaku negara-negara barat dan negara-negara berkembang tetapi juga identitas dari negara-negara tersebut. Struktur sosial sesungguhnya menyediakan ruang yang cukup bagi negara-negara tersebut untuk memengaruhi lingkungannya dan sebaliknya. Dengan demikian, berbeda dengan kaum neorealis dan neoliberal yang mengatakan bahwa struktur merupakan faktor paling menentukan perilaku aktor atau agen, sehingga aktor atau agen itu sendiri hampir tidak punya pilihan lain, kaum konstruktivis berpendapat bahwa aktor atau agen-agen, dalam konteks ini negara-negara barat dan negara-negara berkembang, dimungkinkan memiliki pilihan-pilihan sendiri sebagai keputusan subjektif yang dihasilkan dari suatu proses interaksi intersubjektif.

Lebih lanjut, pemahaman tentang perubahan terhadap terminologi negara-negara berkembang, harus dilihat sesuai pandangan konstruktivisme yang memandang dunia sebagai suatu proyek yang sedang dibangun atau sedang dalam proses menjadi sesuatu, bukan sesuatu yang telah jadi atau selesai seperti dipahami oleh positivisme dan materialisme (Adler, 2002). Dalam bahasa Wendt, situasi dan karakter politik internasional, termasuk terbentuk dan berkembangnya konsep negara-negara berkembang, diciptakan melalui suatu proses, dan bukan ditakdirkan seperti apa adanya pada suatu masa. Keberadaan negara-negara berkembang tersebut adalah produk dari proses interaksi dan saling memahami antaraktornya. Interaksi tersebut dapat berupa pemberian sinyal-sinyal, penyebutan, dan penamaan, gestur, gelagat diplomasi satu sama lainnya, yang kemudian diinterpretasikan dan direspon dengan kebijakan yang tepat (Wendt, 1992).

Jika kaum neorealis dan neoliberalis melihat struktur internasional berpengaruh langsung terhadap politik luar negeri suatu negara, kaum konstruktivis melihat struktur internasional (oleh kaum konstruktivis disebut *ideational structure*) hanya memiliki pengaruh yang membentuk (*constitutive*) dan mengatur (*regulative*) bukan pengaruh langsung yang bersifat kausalitas terhadap negara-negara tersebut. Struktur internasional tersebut membantu proses pembentukan kembali identitas negara-negara barat dan negara-negara berkembang (mendefinisikan siapa diri mereka) dan kemudian menciptakan kepentingan mereka (tujuan dan peran yang mereka yakini harus dilakukan) (Copeland dalam Wendt, 1992). Karena sistem internasional bersifat relatif dan hasil bentukan bersama, maka ia juga bisa diubah oleh negara-negara barat dan negara-negara berkembang sesuai dengan ide-ide dan pemikiran serta norma-norma dan nilai-nilai baru yang mereka yakini kebenarannya.

Dengan konteks tersebut, apakah suatu atau beberapa negara disebut sebagai negara-negara berkembang atau negara-negara maju amat tergantung pada bagaimana negara-negara tersebut saling mengonstruksikan dalam struktur politik internasional pada waktu tertentu (Fierke, 2007). Ini artinya dalam pandangan konstruktivis negara-negara itu sendiri yang menentukan *'the nature'* struktur internasional termasuk keberadaan negara-negara

berkembang. Dan yang lebih penting lagi, lanjut Cynthia Weber, *"what states do depends upon what states' identities and interests are, and identities and interests change"* (Weber, 2001). Jika identitas dan kepentingan negara-negara barat dan berkembang menghasilkan sesuatu yang bersifat kompetitif maka perilaku negara tersebut akan kompetitif, jika identitas dan kepentingan negara menghasilkan sesuatu yang bersifat kooperatif maka perilaku negara tersebut akan kooperatif (Weber, 2001).

PEMBAHASAN

ASAL-USUL KONSEP *'DEVELOPING COUNTRIES'*

Pengelompokan negara-negara di dunia menjadi negara-negara berkembang dan negara-negara maju pada dasarnya merupakan produk dari Perang Dingin. Setelah Perang Dunia II, dunia terpecah menjadi dua kubu besar secara geopolitik dan *spheres of influences*. Meskipun perspektif saling bertentangan, baik dalam bidang politik dan pemerintahan maupun dalam sistem sosial dan ekonomi, namun, dua kubu tersebut lebih kurang mempunyai kepentingan ekonomi dan politik yang sama dalam panggung politik dunia.

Blok pertama terdiri dari negara-negara yang dikategorikan sebagai negara industri, kapitalis, liberal, dan demokratis. Negara-negara yang termasuk dalam kelompok ini adalah negara-negara di Amerika Utara, Eropa Barat, Jepang, dan Australia, yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Kelompok negara-negara ini selanjutnya mengklaim diri mereka sebagai dunia pertama (*first world*) dan/atau negara-negara maju (*developed countries*). Blok kedua, disebut dengan dunia kedua (*second world*) merujuk ke negara-negara anggota blok komunis-sosialis dan negara-negara industri di bawah pengaruh bekas Uni Soviet. Awalnya, kelompok negara-negara ini meliputi Rusia, Eropa Timur, Asia Tengah, Tiongkok, dan Kuba. Blok ketiga yaitu apa yang disebut dengan dunia ketiga (*third world*) yang terdiri dari sebagian besar penduduk dunia dan 'dianggap' tidak tergabung (beraliansi) dengan negara-negara kelompok dunia pertama dan kedua. Dunia ketiga ini sering juga disebut sebagai 'negara-negara sedang berkembang' yang umumnya berada di Afrika, Asia, dan Amerika Latin.

Sebenarnya istilah dunia ketiga ini bukan hanya meliputi negara-negara sangat miskin seperti Kongo,

Rwanda, ataupun Burkina Faso, tetapi juga meliputi negara-negara menengah dan kapitalis seperti Indonesia, negara-negara komunis seperti Kuba, serta negara-negara kaya seperti Saudi Arabia. Namun, dalam wacana umum, pengertian dunia ketiga selalu dikaitkan dengan negara-negara yang mengalami persoalan rendahnya pertumbuhan ekonomi, tingginya angka kemiskinan, pertumbuhan penduduk tinggi, tingkat kematian bayi yang tinggi, rendahnya pemanfaatan sumber daya alam, dan tingginya ketergantungan terhadap negara-negara industri maju (McColl, 2005). Ringkasnya, negara-negara yang tergolong dalam dunia ketiga ini adalah negara-negara yang mengalami keterbelakangan secara sosial dan ekonomi di Asia, Afrika, Oceania, dan Amerika Latin.

Ciri lain yang sering diidentikkan dengan dunia ketiga adalah cenderung memiliki ketergantungan ekonomi yang tinggi terhadap negara-negara maju (*developed countries*) dan umumnya ditandai oleh kemiskinan dan ketidakstabilan politik dan pemerintahan, tingginya tingkat pertumbuhan penduduk, buta huruf, dan penyebaran penyakit yang masih meluas. Selain itu, yang lebih penting, negara-negara termasuk kelompok dunia ketiga ini, umumnya memiliki hutang luar negeri (*foreign debt*) yang besar terhadap negara-negara maju.

Asal-usul terminologi 'negara-negara berkembang' (*developing countries*) sendiri sulit diketahui. Akan tetapi, yang jelas istilah tersebut mulai populer digunakan setelah Perang Dunia II. Ada yang mengatakan bahwa asal-usul terminologi dunia ketiga tersebut berasal dari Alfred Sauvy, seorang ahli demografi Perancis, yang menulis untuk pertama kalinya istilah tersebut dalam majalah *L'Observateur*. Dalam tulisan tersebut, Sauvy menggunakan terminologi *third world* (*'tiers monde'*) untuk menunjuk negara-negara yang tidak termasuk dalam blok komunis maupun blok kapitalis selama Perang Dingin (Sauvy, 1952).

Fakta lain menunjukkan bahwa pembagian dunia menjadi negara-negara berkembang dan negara-negara maju mulai terjadi pada tahun 1960-an. Pada waktu itu istilah negara-negara berkembang kadang disebut sebagai '*the developing world*' sedangkan untuk negara-negara maju sering disebut sebagai '*the western world*'. Dua kelompok negara-negara ini memiliki perbedaan yang kontras satu sama lain di hampir semua bidang. Kelompok negara-

negara maju umumnya dicirikan sama dengan dunia pertama atau '*the western world*', sedangkan negara-negara berkembang dicirikan sama dengan negara-negara dunia ketiga atau '*the developing world*' seperti telah disebutkan di atas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terminologi negara-negara berkembang (dan juga negara-negara maju sebagai lawannya) merupakan terminologi yang sama dengan atau pengganti dari masing-masing terminologi dunia pertama dan dunia ketiga seperti telah dijelaskan di atas.

Pemahaman tentang asal-usul konsep atau terminologi negara-negara berkembang akan menjadi semakin jelas jika dikaitkan dengan fenomena maraknya dekolonisasi yang melahirkan banyak negara merdeka pasca Perang Dunia II. Dalam artikelnya yang mengulas tentang ekonomi pembangunan, Clive Bell menggunakan istilah '*pioneers*' dan '*latecomers*' untuk membedakan negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Bahwa negara-negara yang baru merdeka (*latecomers*) hadir di dunia dalam kondisi miskin. Sedangkan, negara-negara yang sudah lebih dahulu ada (*pioneers*), hadir dengan kondisi telah kaya dan maju. Jadi, dalam konteks ini, pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara berkembang dilihat oleh Bell sebagai suatu proses di mana "*latecomers catch up with pioneers*" (Bell, 1987: 1).

Berdasarkan argumen-argumen yang mereka kem- bangkan, maka semua konsep, teori, dan perspektif yang digunakan untuk menganalisis fenomena negara-negara berkembang tersebut sesungguhnya dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok yang pro kapitalisme, leberalisme, dan demokrasi ala barat (misal liberalisme), dan kelompok yang anti perspektif barat atau pro sosialis komunis (misalnya marxisme). Dengan demikian, sulit dibantah bahwa konsep negara-negara berkembang ini (dengan berbagai variasinya) merupakan hasil konstruksi dari negara-negara yang bersaing dan berkompetisi secara ideologis dan politik di era Perang Dingin, yaitu blok barat dan timur.

Perkembangan ilmu pengetahuan dalam isu pembangu- nuan setelah Perang Dunia II tersebut berjalan sejajar dengan menguatnya kepentingan politik masyarakat dunia, terutama negara-negara barat, dalam isu yang sama. Hal ini terlihat dengan dimasukkannya isu-isu tersebut dalam

tujuan didirikannya Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tahun 1945. Walaupun motif dan tujuan dasar didirikannya PBB tersebut, utamanya, adalah menciptakan perdamaian dan keamanan dunia, namun organisasi dunia tersebut juga merumuskan tujuan untuk memajukan dan meningkatkan pembangunan sosial dan standar hidup serta kebebasan yang lebih luas (Nielsen, 2011). Sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB sebagai berikut:

We the Peoples of the United Nations Determined:

1. *to save succeeding generations from the scourge of war, which twice in our lifetime has brought untold sorrow to mankind, and*
2. *to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women and of nations large and small, and*
3. *to establish conditions under which justice and respect for the obligations arising from treaties and other sources of international law can be maintained, and*
4. *to promote social progress and better standards of life in larger freedom* (Charter of The United Nations, 2003).

Penetapan tujuan di bidang sosial dan ekonomi seperti tercantum dalam poin 4 di atas dilakukan karena PBB memahami kondisi umum yang dialami negara-negara berkembang waktu itu. Dengan menggunakan suatu ukuran komparatif dari tingkat kemiskinan, literasi, pendidikan, harapan hidup, dan faktor-faktor lainnya terhadap negara-negara di seluruh dunia, maka PBB melihat bahwa pada waktu itu negara-negara berkembang adalah negara-negara yang secara relatif memiliki standar hidup rendah, basis industri tidak berkembang, dan Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index/HDI*) sedang hingga rendah (Sullivan & Sheffrin, 2003: 471).

Dari penjelasan di atas tampak bahwa proses pengelompokan negara-negara tersebut sangat sarat dengan nuansa rivalitas kepentingan ideologi dan politik dua kubu besar era Perang Dingin yaitu blok komunis dan blok kapitalis. Penting untuk dicatat bahwa proses pengklasifikasian atau pengelompokan negara-negara tersebut dilakukan oleh negara-negara barat, dan hampir tidak melibatkan negara-negara yang termasuk blok komunis. Terminologi negara-negara berkembang dan negara-negara maju seutuhnya merupakan produk dari konstruksi barat dan dikembang-

kan serta dimanfaatkan oleh barat pula melalui pembentukan organisasi internasional seperti PBB. Oleh karena organisasi ini didominasi oleh ide dan gagasan barat, maka sulit dibantah bahwa konsep negara-negara berkembang bukan saja merupakan suatu hasil konstruksi para aktor negara-negara barat tetapi juga bagian yang tidak terpisahkan dari upaya barat untuk menguasai dan mengontrol dunia demi kepentingan ekonomi, politik, ideologi, dan keamanan mereka.

PERBEDAAN PENDEKATAN DAN KRITERIA

Memahami konsep *developing countries* seharusnya dimulai dengan memahami konsep 'pembangunan' (*development*) terlebih dahulu, karena '*development*' merupakan konsep dasar dari terminologi tersebut. Untuk itu diperlukan pengertian yang sama tentang apa yang dimaksud '*development*'. Pemahaman mengenai definisi 'pembangunan' sangat fundamental untuk membedakan dan membandingkan negara-negara berkembang dan negara-negara maju. Sayangnya, sampai saat ini tidak ada definisi tentang '*development*' yang diterima dan disepakati secara universal. Umumnya konsep pembangunan, sangat didominasi oleh pendekatan atau perspektif ekonomi klasik barat, yang umumnya merujuk ke *economic development* yaitu "*sustained increases in per capita real income, dan neoclassical economists paid scant attention to the issue altogether*" (Nielsen, 2011: 5).

Ketiadaan definisi yang diterima secara universal ini menyebabkan ketiadaan ukuran atau kriteria yang diterima secara universal pula terhadap klasifikasi negara-negara berkembang dan negara-negara maju. Hal ini diakui sendiri oleh PBB seperti dinyatakan bahwa "*There is no commonly agreed definition of developing countries.*" Pernyataan tersebut diperkuat oleh *the United Nations Statistics Division* yang mengatakan;

There is no established convention for the designation of "developed" and "developing" countries or areas in the "United Nations" system. The designations "developed" and "developing" are intended for statistical convenience and do not necessarily express a judgment about the stage reached by a particular country or area in the development process (United Nations Statistics Division, 2014).

Karena ketiadaan suatu metodologi dan konsensus bagaimana caranya mengklasifikasi negara-negara berdasarkan tingkat perkembangannya, maka beberapa organisasi internasional memiliki cara sendiri dalam mengklasifikasikan, mendefinisikan, dan mengonseptualisasikan apa yang dimaksud dengan negara-negara berkembang. Setiap organisasi internasional memiliki terminologi yang berbeda pula dalam menyebut negara-negara berkembang.

PBB, misalnya, di samping menggunakan terminologi '*developing countries*', juga kadang menggunakan istilah '*less-developed countries*', '*least developed countries*', '*small island developing states*', dan '*landlocked developing countries*' untuk menggantikan istilah ini. Dengan menggunakan kriteria tersebut, PBB sampai saat ini setidaknya menetapkan lebih dari 2/3 negara-negara di dunia tergolong sebagai negara-negara berkembang. Pada tahun 2008, tercatat 152 negara tergolong negara berkembang di dunia.¹

Sementara itu, *Organization of Economic Cooperation and Development* (OECD) menggunakan keanggotaan dalam organisasi tersebut sebagai kriteria utama untuk menentukan status negara *developed country* atau bukan. Dalam preambule OECD secara tegas mengatakan bahwa negara-negara anggota "*economically more advanced nations should co-operate in assisting to the best of their ability the countries in process of economic development*" (Lihat Preambule OECD). Oleh karena anggota OECD sangat terbatas pada sejumlah kecil negara-negara di dunia (34 negara sampai 20 negara anggota pada saat pendiriannya tahun 1961), maka pendekatan ini menyisakan tidak kurang dari 80-85 persen dari negara-negara di dunia masuk dalam kategori negara-negara berkembang dan hanya 15-20 persen yang termasuk negara-negara maju (Nielsen, 2011).

Berbeda dengan organisasi-organisasi internasional tersebut, kebanyakan negara-negara berkembang sendiri lebih suka menyebut atau mengidentifikasi diri mereka dengan sebutan atau istilah berbeda dengan sebutan-sebutan di atas. Beberapa terminologi atau konsep yang mereka pakai untuk menyebut diri mereka juga tidak jarang mengandung makna 'perlawanan' atau kontra terhadap kubu-kubu yang sudah dibuat oleh blok barat dan timur. Misalnya mereka menyebut diri sebagai 'negara-negara non-blok' (*non-aligned movement*), 'negara-negara selatan' (*the south countries*). Walaupun, dalam kenyataannya, ada banyak

pula anggota-anggota dari negara-negara non-blok ini sesungguhnya dekat dengan beberapa kekuatan adidaya yang memimpin kedua blok sebelumnya, yaitu blok komunis dan blok kapitalis. Kuba misalnya, sangat dekat dengan bekas Uni Soviet waktu itu, atau Filipina yang dekat dengan Amerika Serikat.

Dengan demikian, makna dan tujuan penggunaan terminologi negara-negara berkembang amat tergantung pada siapa yang mengonstruksikan dan menggunakan terminologi tersebut. Itulah sebabnya mengapa kadang istilah tersebut digunakan berbeda-beda antara satu negara atau kelompok negara atau badan dan lembaga dunia. Kadang mereka menggunakan terminologi *less developed countries* (LDCs), *least economically developed countries* (LEDCs), *underdeveloped nations* atau *third world nations*, dan *non-industrialized nations*. Sebaliknya, mereka juga menggunakan istilah berbeda untuk negara-negara maju dengan sebutan, misalnya, *developed countries* atau *most economically developed countries* (MEDCs) atau *the first world nations* dan '*industrialized nations*'.²

Salah satu penjelasan mengapa tidak ada suatu sistem klasifikasi yang diterima secara umum tersebut adalah karena sifat normatif yang inheren dalam sistem tersebut. Sepasang konsep yang saling bersanding (dan 'berlawanan') *developing countries* dan *developed countries*, yang muncul tahun 1960-an merupakan cara yang dianggap *politically and morally correct* untuk mengklasifikasikan negara-negara, khususnya dalam konteks pembicaraan kebijakan transfer sumber-sumber riil dari negara-negara kaya (*developed countries*) ke negara-negara miskin (*developing countries*). Namun sayangnya, operasional konsep tersebut dianggap benar secara 'moral' dan politik hanya oleh barat, tidak oleh negara-negara dunia kedua dan juga oleh sebagian negara-negara dunia ketiga (negara-negara berkembang) itu sendiri.³ Mengingat *resource transfers* mau tidak mau melibatkan kepentingan ekonomi dari negara-negara tersebut, maka definisi terhadap negara-negara berkembang dan negara-negara maju menjadi penting dan menjadi bahan perdebatan.

KRITERIA MENURUT *UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME*

Contoh paling jelas adanya perbedaan pendekatan

dalam penentuan kriteria pengklasifikasian negara-negara ini dapat dilihat dari kriteria yang ditentukan oleh tiga organisasi internasional utama, yaitu *United Nations Development Programme* (UNDP), Bank Dunia, dan IMF seperti berikut ini. Selama bertahun-tahun PBB (*the UN General Assembly*) telah memperdebatkan isu klasifikasi negara-negara di dunia. Misalnya, dalam tahun 1971 *the General Assembly* telah mengidentifikasi sekelompok negara-negara yang dinamakannya *least developed countries*, sebagai negara-negara target untuk mendapatkan perhatian khusus dalam konteks yang disebut *the second UN development decade for the 1970s*. Akan tetapi, *the General Assembly* tidak pernah membangun suatu taksonomi pembangunan untuk anggota-anggota penuhnya. Belakangan beberapa organisasi internasional seperti UNDP, Bank Dunia, dan IMF yang membuat taksonomi tersebut. Sayangnya taksonomi (ukuran atau kriteria) yang ditentukan oleh ketiga organisasi dunia tersebut berbeda satu sama lainnya, sehingga konsepsi tentang negara-negara berkembang yang dihasilkan juga berbeda.

UNDP sejak tahun 1990 mengklasifikasikan negara-negara di dunia berdasarkan pada *human development index* (HDI). Agar dapat mencakup sifat multifaset dari pembangunan, maka UNDP menetapkan HDI terdiri dari tiga aspek; *achievements in longevity, education, dan income* (pendapatan). Bidang lain dari pembangunan seperti *political freedom* dan *personal security* juga diakui penting walaupun tidak dielaborasi dan dianalisis secara lebih jauh dalam HDI. Aspek pendapatan yang digunakan dalam HDI adalah *gross national income per capita* (GNI/n), sedangkan *longevity* diukur melalui angka harapan hidup. Pendidikan diukur dari kombinasi ukuran aktual dan perkiraan lama belajar (World Bank, 1997).

Dalam klasifikasi ekonomi pertamanya, pada tahun 1971, *world development indicators* membagi negara-negara dunia ke dalam tiga kategori yaitu: (1) *developing countries*, (2) *industrialized countries*, dan (3) *capital-surplus oil-exporting countries*. *Developing countries* dikategorikan sebagai negara dengan *low income* (GNI/n sebesar US\$250 atau kurang) dan *middle-income* (GNI/n di atas US\$250). Selanjutnya, UNDP juga menetapkan subkategori untuk kelompok '*developing countries*' yaitu (1) *low human development countries*, (2) *medium human development countries*, dan (3) *high human*

development countries.⁴ Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengapa lembaga ini menggunakan terminologi-terminologi tersebut untuk menyebut beberapa kelas negara selain berdasarkan pada kriteria yang sudah mereka tentukan tersebut di atas.

KLASIFIKASI MENURUT BANK DUNIA

Pada waktu didirikan tahun 1960, lembaga ini melakukan klasifikasi negara-negara anggotanya hanya berdasarkan pada dua hal; negara-negara yang diperkirakan atau diharapkan dapat menyumbang secara finansial terhadap bank tersebut dan negara-negara yang diperkirakan dapat mengambil manfaat (meminjam) dari lembaga tersebut. Dengan kata lain Bank Dunia hanya mengelompokkan negara-negara anggotanya menjadi 2 (dua) kategori yaitu negara donor dan negara-negara penerima atau peminjam.⁵ Bagaimana dan apa dasar pengkategorian tersebut? Kutipan berikut membantu menjawab pertanyaan tersebut.

*Well, this presented the Bank with an interesting and rather difficult question. A large number of economic criteria were made available by the Bank, the amount of capital exported by the country, the gross national product of the country, and various other things of that sort. These were reviewed by the Board of Directors. But, in the ultimate analysis, the management of the Bank was invited to present a list of those countries which, in their opinion, and based on the background [work] of the World Bank, should be in category I and those which should be in category II. The management presented this list, and the various executive directors who were negotiating the charter discussed it and agreed that this was an adequate list.*⁶

Dari kutipan di atas sangat jelas bahwa pembagian negara-negara tersebut sangat sarat dengan kepentingan politik. Pembagian tersebut lebih merupakan suatu *political exercise*: "*a civilized understanding among sovereign countries about how to label each other*" (Nielsen, 2011: 10).

Dalam perkembangannya, Bank Dunia yang sebelumnya merujuk ke *Gross National Product* (GNP) sebagai kriteria dalam mengklasifikasikan negara-negara tersebut pada tahun 1964 berubah menggunakan *Gross National Income* (GNI) per capita sebagai *threshold* untuk eligibilitas

akses ke Bank Dunia (Mason & Asher, 1973). Namun sayangnya, penggunaan kriteria baru ini belum juga mampu mengklasifikasikan negara-negara di dunia secara objektif dan adil serta diterima oleh semua pihak. Spanyol, misalnya, walaupun awalnya diharapkan masuk dalam kelompok pertama (pendonor) tetapi negara tersebut merasa tidak layak duduk di posisi tersebut. Sementara itu, Jepang yang masuk negara *capital exporter* masuk ke dalam kelompok pertama walaupun pada waktu itu negara tersebut masih berada dalam posisi tingkat *income per capita* yang rendah (Mason & Asher, 1973).

Dalam perkembangannya, Bank Dunia lebih condong menggunakan keanggotaan dalam OECD sebagai kriteria untuk mengklasifikasikan negara-negara tersebut ketimbang menggunakan pendapatan sebagai ambang batas antara *developing* dan *industrialized countries*. Namun, sekali lagi penerapan kriteria ini juga menimbulkan banyak kejanggalan dan ketidakjelasan. Sebagai misal, empat anggota OECD (Yunani, Portugis, Spanyol, dan Turki), malah ditempatkan dalam kelompok negara-negara berkembang. Sementara itu, Afrika Selatan yang bukan anggota OECD justru masuk dalam kelompok negara-negara industri (Mason & Asher, 1973).

Ketidakkonsistenan dalam pengklasifikasian juga terjadi terhadap negara-negara yang dinamakan *capital surplus oil exporters* (Iran, Iraq, and Venezuela). Pada tahun 1970-an negara-negara ini masih dikelompokkan dalam negara-negara berkembang. Padahal dilihat dari indikator yang dipakai oleh OECD seharusnya negara-negara tersebut tidak termasuk dalam kelompok ini. Sedangkan, dua negara yang relatif miskin seperti Afrika Selatan (GNI/n of US\$1,340) dan Irlandia (GNI/n of US\$2,560) masuk dalam kelompok *industrialized countries*, padahal lima negara lainnya (Israel, Singapura, Venezuela, dan anggota OECD—Yunani dan Spanyol) dengan tingkat pendapatan melebihi Irlandia justru masuk dalam kelompok negara-negara berkembang. Perlu pula dicatat, bahwa pada waktu itu tiga dari lima negara tersebut—Yunani, Spanyol, dan Venezuela—merupakan negara-negara yang aktif meminjam dari IBRD sedangkan Afrika Selatan dan Israel telah berhenti meminjam dalam tahun 1966 dan 1975 secara berturut-turut (World Bank, 1997).

Menyadari kelemahan sistem klasifikasi sebelumnya,

maka pada tahun 1989 Bank Dunia melakukan reformasi mendasar terhadap sistem klasifikasi negara-negara dunia. *Pertama*, lembaga ini menetapkan apa yang disebut dengan *high-income country*—meliputi negara-negara dengan GNI/n di atas US\$6,000. Dengan kategori baru ini maka *high-income country* meluas cakupannya bukan saja terdiri dari negara-negara industri lama tetapi juga termasuk negara-negara *capital-surplus oil-exporter*. Ada 30 negara yang masuk dalam kategori baru ini, termasuk negara-negara OECD, kecuali Turki. *Kedua*, menetapkan adanya kategori negara-negara yang disebut kelompok *the middle income developing countries*, yaitu negara-negara yang ada di tengah antara negara-negara dengan *lower* dan *upper middle-income*. *Ketiga*, seiring dengan dihapuskannya istilah *the industrialized countries*, maka Bank Dunia juga menghilangkan istilah *the developing countries* (World Bank, 1997).

Walaupun demikian, lembaga ini menyatakan bahwa akan lebih baik jika negara-negara di dunia menggunakan terminologi *low and middle-income countries* sebagai ganti dari *developing countries*. Hasilnya, selama 20 tahun Bank Dunia tetap menggunakan istilah *low and middle income economies* ini untuk merujuk ke *developing economies*. Menurut Nielsen, beragam terminologi tersebut dipakai lebih untuk kepentingan '*convenience*'; "*it is not intended to imply that all economies in the group are experiencing similar development or that other economies have reached a preferred or final stage of development*" (Nielsen, 2011: 13).

PENGELOMPOKAN MENURUT *INTERNATIONAL MONETARY FUND*

Berbeda dengan UNDP dan Bank Dunia, pada saat didirikannya tahun 1944 *International Monetary Fund* (IMF) tidak memuat aturan yang secara tegas mengelompokkan keanggotaannya berdasarkan tingkat kemajuan pembangunan. Dalam tiga dekade pertama, misalnya, kebijakan operasional IMF berkaitan dengan bantuan keuangan, pengawasan, dan bantuan teknis tidak membedakan antara anggota berdasarkan tingkat pembangunan mereka. Sebagai contoh *the Compensatory Financing Facility* dan *the Buffer Stock Financing Facility*, yang didirikan pada tahun 1963 dan 1969, walaupun awalnya dimaksudkan untuk tujuan menyediakan sumber dana untuk *specific balance of payments* yang dibutuhkan oleh negara-negara berkembang,

Tabel 1. Sistem Klasifikasi Negara oleh UNDP, Bank Dunia, dan IMF

| Institusi | UNDP | World Bank | IMF |
|---|---|---|--|
| Name of 'developed countries' | Developed countries | High-income countries | Advanced countries |
| Name of 'developing countries' | Developing countries | Low- and middle-income countries | Emerging and developing countries |
| Development threshold | 75 percent in the HDI distribution | US\$6,000 GNI per capita in 1987-prices | Not explicit |
| Subcategories of 'developing countries' | (1) Low human development countries, (2) Medium human development countries, and (3) High human development countries | (1) Low-income countries and (2) Middle-income countries | (1) Low-income developing countries and (2) Emerging and other developing countries |

Sumber: Diolah dan dimodifikasi dari Lyng Nielsen, "Classifications of Countries Based on Their Level of Development: How it is Done and How it Could be Done," IMF Working Paper, Februari 2011

tetapi semua anggota penuh tetap diberikan hak untuk memanfaatkan fasilitas tersebut, termasuk negara-negara maju (Garritsen de Vries, 1986).

Dalam klasifikasi, awalnya IMF membagi negara-negara dunia ke dalam tiga kelompok yaitu (1) *industrial countries*, (2) *other high-income countries*, dan (3) *less-developed countries*. Namun pada awal tahun 1970-an dengan klasifikasi baru lembaga ini mengubah pengelompokan dan penyebutan negara-negara tersebut menjadi (1) *industrial countries*, (2) *primary producing countries in more developed areas*, dan (3) *primary producing countries in less developed areas*. Pada akhir tahun 1970-an klasifikasi dan penyebutan terhadap negara-negara dunia tersebut berubah lagi secara signifikan menjadi (1) *industrial countries*, (2) *other Europe, Australia, New Zealand, South Africa*, (3) *oil exporting countries*, dan (4) *other less developed areas*. Dan akhirnya pada tahun 1980-an kategori tersebut dibuat lebih simpel dengan membagi negara-negara dunia hanya dalam dua kategori yaitu (1) *industrial countries* and (2) *developing countries* (Garritsen de Vries, 1986).

Berdasarkan sistem klasifikasi terakhir di atas, maka IMF menyebut ada 21 negara yang termasuk kelompok *industrial countries*. Pada tahun 1989 Yunani dan Portugal yang sebelumnya masuk dalam kelompok *developing countries* dimasukkan kembali dalam kelompok *industrial countries*. Sayangnya tidak ada penjelasan memadai mengapa terjadi perpindahan status terhadap kedua negara ini. Pada tahun 1997, kelompok *the industrial countries* diganti dengan

sebutan *the advanced country group*. Alasannya sebagai pengakuan atas menurunnya saham dari sektor manufaktur terhadap perekonomian semua negara-negara anggota kelompok tersebut. Pada saat yang sama, Israel, Korea Selatan, dan Singapura dimasukkan ke dalam kelompok *industrial countries*. Pertimbangannya karena ketiga negara tersebut dianggap memenuhi kriteria sebagai negara industri, yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tingginya tingkat pendapatan masyarakatnya, pasar uang yang berkembang pesat, struktur ekonomi yang terdiversifikasi dengan baik dan pesatnya pertumbuhan sektor pelayanan.

Setelah tahun 1997, penambahan negara-negara yang termasuk dalam kelompok *industrial countries* terus terjadi. Misalnya Cyprus (2001), Slovenia (2007), Malta (2008), the Czech Republic (2009), dan the Slovak Republic (2009) (Garritsen de Vries, 1986). Namun sekali lagi tidak ada penjelasan yang rasional dan diterima mengapa negara-negara tersebut di atas dimasukkan dalam kelompok *industrial countries*. Tetapi dalam kasus dimasukkannya Slovenia, Malta, dan Slovak Republic ke dalam kelompok *industrial countries*, tampaknya sangat sarat dengan kepentingan politik. Hal ini mengingat kebijakan tersebut diambil pada saat negara-negara tersebut baru saja bergabung dengan Uni Eropa.

Yang menarik, semua negara yang oleh IMF dikategorikan sebagai negara-negara maju juga dikategorikan oleh UNDP sebagai negara-negara maju. Sedangkan Barbados,

Brunei Darussalam, Estonia, Hungaria, Polandia, Qatar, dan Uni Emirat Arab bukanlah negara-negara maju menurut IMF. Di lain sisi, kelompok negara dengan pendapatan tinggi menurut Bank Dunia adalah kelompok yang lebih besar melampaui kelompok negara-negara maju dan telah berkembang. Negara-negara *high-income countries* menurut klasifikasi Bank Dunia yang tidak 'maju' maupun 'developed' termasuk Bahama, Kroasia, Guinea Khatulistiwa, Kuwait, Latvia, Oman, Saudi Arabia, dan Republik Trinidad dan Tobago. Karena lembaga-lembaga internasional tersebut pada umumnya berkesimpulan yang sama terhadap keanggotaan kelompok negara-negara maju, maka komposisi kelompok negara-negara berkembang juga seharusnya sama. Tabel 1 menyajikan suatu gambaran umum terhadap taksonomi yang digunakan oleh tiga organisasi internasional seperti telah dibahas di atas.

Dari tabel 1, dan juga penjelasan sebelumnya, tampak jelas bahwa bukan saja setiap organisasi internasional tersebut menggunakan ambang batas pembangunan (*development thresholds*) yang sangat berbeda satu sama lainnya, tetapi juga tidak ada kejelasan argumen yang dipakai oleh ketiga organisasi internasional tersebut dalam menentukan ambang batas mereka masing-masing.

KRITIK DAN PERDEBATAN

Dengan menggunakan laporan dari berbagai organisasi internasional seperti tersebut di atas, terlihat bahwa tingkat perkembangan suatu negara ternyata didasarkan atas kriteria yang berbeda satu sama lainnya. Akibatnya, negara-negara yang menempati peringkat tinggi menurut ukuran tertentu bisa saja menempati peringkat rendah jika menggunakan kriteria lain. Menurut pandangan umum, misalnya, bahwa peningkatan tingkat pendapatan per kapita suatu negara akan dengan sendirinya menyebabkan perkembangan di bidang yang lain. Namun, dalam kenyataannya peningkatan pendapatan per kapita tidak selalu diikuti oleh perkembangan atau peningkatan kondisi sosial dan kesejahteraan umum masyarakat negara tersebut. Negara-negara yang memiliki peringkat tinggi dalam pendapatan per kapita mungkin saja menempati peringkat rendah dalam konteks perkembangan struktur dan perkembangan sosial. Sebaliknya, negara-negara yang miskin mungkin saja menempati peringkat tinggi dalam

tata kelola negara dan masyarakat dan tingkat kebebasan politik dan ekonomi individualnya (Sanford, 2003).

Bukti lain dari pendekatan yang sarat muatan politik dan ideologi tersebut terlihat manakala negara-negara barat (melalui lembaga-lembaga internasional yang mereka bentuk seperti UNDP, IMF, dan Bank Dunia) dengan mudah menyebut bahwa Kamboja adalah sebuah negara berkembang, dan Jepang adalah negara maju. Tetapi pada saat yang sama, mereka tidak terlalu antusias dan mampu dalam mengklasifikasikan apakah Malaysia atau Rusia masuk sebagai negara-negara maju atau negara-negara berkembang. Hal ini bisa terjadi mungkin saja karena kedua negara ini tidak cukup sesuai untuk masuk dalam kerangka konstruksi klasifikasi dikotomik tersebut. Tetapi ada juga kemungkinan hal tersebut terjadi karena pertimbangan politik, khususnya dalam kasus Rusia.

Oleh karena itu, dapat dipahami apabila banyak kritik terhadap pengelompokan serta penggunaan terminologi negara-negara berkembang berdasarkan taksonomi yang berbeda-beda. Terminologi tersebut dinilai sarat dengan muatan politik dan ideologi dari negara-negara barat. Itulah sebabnya beberapa kritikus melihat '*development*' sesungguhnya sebagai suatu eufemisme negara barat untuk kepentingan penatarasi dan dominasi mereka terhadap dunia (Kapoor, 2008). Seperti disampaikan oleh Stanley Diamond, "*processes of civilization have always involved conquest, violence, coercion and oppression*" terhadap masyarakat yang dianggap kurang beradab. Sebagai contoh penetrasi barat terhadap Amerika Utara yang telah menjadikan suku Indian sebagai korban dan penetrasi barat terhadap Afrika yang telah memunculkan perbudakan, dll. Diamond tidak hanya memberi contoh dampak ekspansi barat di dunia, tetapi juga memberi contoh di manapun suatu bangsa menyebarkan peradabannya akan selalu melibatkan 'api' dan 'pedang', seperti terjadi di era penyebaran peradaban Yunani, Romawi, dan Mesir kuno (Diamond, 2009).

Kritik, dan bahkan penentangan, terhadap dominasi peradaban barat tersebut juga pernah disampaikan oleh Presiden Indonesia Pertama, Soekarno. Soekarno melihat negara-negara maju sebagai suatu yang negatif seperti disebutnya dengan terminologi *The Old Established Forces* (OLDEFOS). Sedangkan, negara-negara berkembang disebutnya dengan istilah lebih positif dan progresif yaitu

The New Emerging Forces (NEFOS). Tujuan didirikan NEFOS ini adalah untuk melawan negara-negara kolonialis dan imperialis yang dinamakan OLDEFOS yang dianggap telah menindas bangsa-bangsa yang tergabung dalam NEFOS.⁷ Dalam pidatonya untuk membuka Konferensi Asia-Afrika April 1955 di Bandung, Soekarno mengingatkan para delegasi akan ancaman neokolonialisme dan neoimperialisme terhadap negara-negara Asia-Afrika, dan sekaligus menyiratkan bahwa Indonesia siap berdiri di depan dalam memerangnya.

And I beg of you, do not think of colonialism only in the classic form which we in Indonesia and our brothers in different parts of Asia and Africa knew. Colonialism has also its modern dress, in the form of economic control, intellectual control, actual physical control by a small but alien community within a nation (Leifer, 1983).

Dari pidato Soekarno tersebut menjadi jelas bahwa konstruksi negara-negara berkembang terhadap negara-negara maju juga berbeda seperti halnya konstruksi negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang.

Penggunaan istilah negara berkembang sering pula dianggap mengandung arti merendahkan negara-negara berkembang tersebut dibandingkan negara-negara maju. Secara implisit dalam setiap pemakaian terminologi 'development' selalu ada pengertian bahwa beberapa negara dan wilayah di dunia sangat miskin dan beberapa negara lainnya yang mewakili sebagian kecil negara-negara di dunia sangat kaya dan maju (Szirmai, 2000). Dalam konteks ini, negara-negara berkembang selalu dikonstruksikan sebagai negara-negara yang terperangkap dalam lingkaran stagnasi dan kemiskinan tak berujung.

Akan tetapi, stereotip terhadap negara-negara berkembang ini dalam kenyataannya tidak selalu benar. Faktanya, banyak negara-negara berkembang yang sukses meningkatkan pertumbuhannya sekaligus memajukan pembangunannya secara dinamis. Sedangkan, negara-negara lain justru mengalami stagnasi atau perlambatan bahkan penurunan pertumbuhan ekonomi, termasuk negara-negara yang dikategorikan sebagai negara-negara maju. Misalnya apa yang dialami oleh Italia, Spanyol, Portugal baru-baru ini, atau bahkan oleh Amerika Serikat sendiri di era George W. Satu lagi yang harus diingat bahwa setiap

negara-negara maju pastilah sebelumnya pernah mengalami sebagai negara berkembang (Szirmai, 2000).

Demikian juga dengan pandangan bahwa negara-negara berkembang akan selalu dihadapkan pada kelangkaan makanan yang berakibat pada kelaparan dan malnutrisi sebagai akibat, salah satunya, oleh ketidakimbangan antara pertumbuhan penduduk dan produksi pangan. Akan tetapi, pandangan ini juga ternyata tidak selalu benar. Dalam banyak kasus justru produksi pangan lebih tinggi dari pertumbuhan penduduknya. Misalnya di Thailand, Vietnam, dan Filipina. Walaupun demikian, harus diakui bahwa masalah pangan dan malnutrisi tetap menjadi masalah penting yang tidak mudah dipecahkan sampai saat ini dan di masa mendatang (Szirmai, 2000).

Argumen bahwa pertumbuhan penduduk yang cepat akan berdampak negatif bagi pembangunan ekonomi negara-negara berkembang memang ada benarnya. Akan tetapi, dalam beberapa kasus pertumbuhan penduduk yang cepat tidak selalu menghambat pembangunan. Bahkan pertumbuhan penduduk tersebut ada kalanya justru memicu pertumbuhan ekonomi dan teknologi. Misalnya kasus yang terjadi terhadap Tiongkok, Indonesia, India, dan Brasil. Sebaliknya, penambahan penduduk yang rendah justru dapat menghambat pertumbuhan ekonomi seperti yang terjadi di Jepang dewasa ini (Szirmai, 2000).

Istilah 'developing' tersebut juga mengandung kelemahan seolah-olah pembangunan suatu negara tidak bisa mundur atau gagal atau statis seperti banyak terjadi di negara-negara di Afrika. Hal yang sama, istilah 'developed country' mengandung makna secara salah bahwa a lack of continuing economic development/growth di negara-negara yang lebih maju. Bahkan melalui istilah tersebut seolah-olah mengabaikan fakta bahwa pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi yang ditandai oleh pertumbuhan ekonomi, di negara-negara maju selalu bergerak maju dan tidak pernah mengalami kemunduran. Padahal dalam kenyataannya, sejak akhir tahun 1990-an negara-negara berkembang justru menunjukkan tren pertumbuhan (GNP) yang lebih tinggi dibanding yang dialami oleh negara-negara maju (Korotayev & Zinkina, 2014).

Selain itu, terminologi 'developing countries' juga dikritik karena seakan-akan semua negara-negara di dunia bersifat dan mempunyai ciri homogen. Akibatnya, ada pandangan

yang menyamakan tingkat kesejahteraan dan kesehatan masing-masing kelompok dalam masyarakat di suatu negara. Padahal dalam kenyataannya tingkat kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara sangat berbeda satu kelompok dengan kelas lainnya.

Kritik selanjutnya ditujukan pada paradigma yang berkembang selama ini bahwa pertumbuhan ekonomi dalam bentuknya yang modern diasosiasikan secara ketat dengan pembangunan ekonomi dari negara-negara barat sejak pertengahan abad ke-18 (Rao & Ark, 2013). Oleh karena itu, terminologi semacam itu juga mengandung makna bahwa negara-negara berkembang harus (didorong) mengikuti arah pembangunan ekonomi seperti yang sudah dan sedang dilakukan oleh barat. Masalahnya secara historis, pertumbuhan ekonomi negara-negara maju dan kaya di Eropa dan Amerika Utara tersebut tidak terlepas dari eksploitasi yang mereka lakukan terhadap negara-negara berkembang melalui proses kolonialisme dan imperialisme di masa lampau. Dengan demikian, agak kurang masuk akal dan kurang bermoral jika membandingkan pembangunan ekonomi negara-negara maju dengan negara-negara berkembang dan juga mengasumsikan bahwa jika negara-negara berkembang ingin maju harus mengikuti jalan yang sudah dilalui oleh negara-negara maju tersebut sebelumnya. Hubungan kesejarahan industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi dari negara-negara maju dan negara-negara berkembang ini menyiratkan pula bahwa konsep dan metode serta proses pembangunan yang dibuat dan dilakukan oleh negara-negara maju tidak dapat diterapkan secara serta merta pada negara-negara berkembang.

Dari pengamatan para ahli diketahui bahwa ternyata walaupun telah terjadi pertumbuhan yang signifikan setelah Perang Dunia II, namun kondisi hidup masyarakat negara-negara berkembang tidak banyak mengalami perubahan yang berarti. Oleh karena itu, beberapa intelektual seperti Dudley Seers, Gunnar Myrdal, Paul Streeten, Hollis Chenery, Mahbub ul Haq serta lembaga internasional seperti *the International Labour Organisation* (ILO) berkesimpulan bahwa pembangunan harus lebih dari sekedar hanya pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur ekonomi (Chenery *et al.*, 1974). Para ilmuwan sosial tersebut, oleh karenanya, menyatakan bahwa pembangunan tidak boleh dilihat hanya dari kaca mata ekonomi

semata.

Sebenarnya konsep pembangunan berdasarkan pertumbuhan ekonomi seperti dijelaskan di atas sudah dikritik secara tajam sejak tahun 1960-an. Terminologi dikotomik negara-negara maju dan negara-negara berkembang dianggap terlalu restriktif, tidak mampu merangkul semua karakter dan kategori dalam pembangunan ekonomi semua negara (Nielsen, 2011). *Development* yang umumnya selalu dikonsepsikan sebagai pertumbuhan ekonomi adalah suatu konsep kuantitatif. Padahal, pembangunan ekonomi jelas lebih dari hanya sekedar pertumbuhan ekonomi. Sehingga tidak mengherankan kalau banyak negara yang tidak suka dengan terminologi tersebut, terutama negara-negara berkembang itu sendiri.

Beberapa negara berkembang mengusulkan adanya ukuran alternatif dalam mengukur tingkat kemajuan suatu negara yaitu apa yang mereka sebut *gross national happiness*, yaitu mengukur tingkat kepuasan dan kebahagiaan masyarakat secara aktual sebagai lawan dari pendekatan yang menentukan maju tidaknya suatu negara di lihat dari perkembangan ekonomi semata. Pembangunan ekonomi seharusnya merujuk ke pertumbuhan yang diikuti oleh perubahan kualitatif dalam struktur produksi dan ketenagakerjaan, umumnya disebut sebagai *structural change* (Kuznets, 1973). Misalnya berubahnya saham sektor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi nasional diganti oleh sektor industri. Atau menguatkan peran teknologi dalam proses produksi. Ini artinya bahwa pertumbuhan ekonomi dapat terjadi tanpa pembangunan atau kemajuan ekonomi. Contoh nyatanya adalah yang terjadi terhadap *oil-exporting countries*, yang mengalami peningkatan yang tajam dalam pendapatan tetapi hampir tidak memperlihatkan perubahan yang berarti dalam struktur ekonominya (Abramovitz, 2014).

Bahkan beberapa ahli lebih jauh mengusulkan agar dalam melihat pembangunan harus pula memperhatikan perubahan dalam struktur keluarga, sikap dan mentalitas, perubahan budaya dan demografik, perubahan politik dan *nation building*, serta transformasi masyarakat rural dan proses urbanisasi. Seers, misalnya, menambahkan tiga sarat lainnya untuk pembangunan, yaitu harus ada penurunan kemiskinan dan malnutrisi, ketimpangan pendapatan, dan pekerjaan harus meningkat (Seers, 1979).

Usulan tersebut didasarkan atas fakta bahwa suatu negara dapat tumbuh secara cepat tetapi tetap buruk dalam bidang literasi, kesehatan, harapan hidup, dan nutrisi (Sen, 1999). Pertumbuhan ekonomi juga dilihat tidak selalu membuat orang menjadi lebih bahagia atau senang, tentram, dan damai. Oleh karena itu, Amartya Sen pernah mengemukakan konsep pembangunan yang lebih luas yaitu fokus pada konsep *freedom* (kebebasan). Sen berargumentasi bahwa seharusnya pembangunan bertujuan menyebarkan kebebasan dengan melenyapkan ketidakbebasan yang menempatkan manusia pada posisi hanya sedikit pilihan dan kesempatan dalam hidupnya, seperti: kelaparan, penyakit, tirani, dll. Menurutnya, pembangunan sesungguhnya adalah suatu "*integrated process of expansion of substantive freedoms.*" Pertumbuhan ekonomi, kemajuan teknologi, dan perubahan politik haruslah dikaitkan atau dinilai pada kontribusinya pada perluasan kebebasan manusia. Di antara kebebasan paling penting yang dimaksud adalah bebas dari kelaparan dan malnutrisi, bebas dari kemiskinan, akses ke kesehatan, dan bebas dari kematian prematur (Sen, 1999).

Pendekatan yang lebih humanistik terhadap pembangunan seperti yang diusulkan oleh Sen tersebut mendorong para ahli untuk mengeksplorasi lebih dalam dan jauh apa yang merupakan kondisi hidup minimum yang dianggap layak dan bisa diterima manusia pada umumnya. Sebagai contoh, suatu standar ekonomi minimum yang bisa diterima dapat meliputi kemampuan seseorang untuk mengonsumsi nutrisi secara layak sehingga tidak terkena malnutrisi. Atau juga meliputi akses ke air bersih, listrik, dan sumber kesehatan, dll. Ini artinya mengisyaratkan pentingnya indikator baru dalam mengukur pembangunan yaitu, indikator sosial seperti: tingkat harapan hidup, tingkat literasi, tingkat pendidikan, angka kematian bayi, kesediaan rumah sakit, dokter, akses ke telepon, dll. (Sen, 1999). Para pengkritik tersebut akhirnya berkesimpulan bahwa khususnya di negara-negara sangat miskin, pertumbuhan adalah prasyarat untuk pembangunan, sementara pembangunan meliputi lebih dari sekedar pertumbuhan.

Dengan menghitung biaya yang diperlukan untuk mencapai standar hidup layak tersebut maka pendapat minimum yang diperlukan untuk standar hidup seperti itu dapat ditentukan. Perhitungan seperti itu dikenal

dengan istilah garis kemiskinan absolut (*absolute poverty lines*). Individual (atau keluarga) dengan *income* di bawah *the poverty line* dianggap sebagai miskin, sedang mereka yang pendapatannya di atas garis tersebut disebut tidak miskin (*non-poor*).

Sen memberi contoh kasus tentang hal ini, di mana masyarakat urban Afrika Amerika memiliki tingkat harapan hidup yang lebih rendah dari rata-rata orang Tiongkok atau penduduk India di negara bagian Kerala, walaupun rata-rata pendapatan per kapita di Amerika jauh lebih tinggi dari kedua negara tersebut. Walaupun demikian, dalam realitasnya, oleh karena harga-harga dan standar hidup layak yang dapat diterima secara politik berbeda dari satu negara ke negara tertentu, maka dapat dipastikan membandingkan tingkat kemiskinan satu negara dengan negara lain sesungguhnya tidaklah mudah dan sangat kompleks (Sen, 1999).

Kritik yang tajam lainnya adalah pada sisi pengabaian yang dilakukan oleh negara-negara maju terhadap negara-negara yang 'sedang berkembang atau miskin' lainnya di luar kelompok negara-negara berkembang (*the third world*) dan negara-negara maju (*the first world*). Pembahasan tentang negara-negara berkembang selama ini (terutama di era Perang Dingin) tidak pernah atau jarang memasukan negara yang termasuk dalam kelompok negara-negara komunis seperti Uni Soviet, Tiongkok, dan Kuba dan negara-negara Eropa Timur lainnya. Pengabaian terhadap negara-negara dalam kelompok *the second world* ini menguatkan dugaan bahwa pengelompokan atau pengklasifikasian negara-negara di dunia yang dilakukan oleh barat selama ini memang benar lebih bermotif politik dan ideologi ketimbang alasan rasional dan moral serta keadilan.

Negara-negara barat hanya berkonsentrasi dengan negara-negara berkembang yang berada dalam *sphere of influences* nya atau diharapkan secara ideologi dan politik berada dalam kubunya. Memberi bantuan pembangunan ekonomi adalah salah satu cara yang dianggap paling tepat untuk mewujudkan tujuan tersebut. Itulah sebabnya negara-negara barat sangat berkepentingan mendirikan lembaga-lembaga internasional seperti PBB, UNDP, Bank Dunia, IMF, dan lain-lain yang kelak akan menjadi titik vokal dalam melayani kebutuhan negara-negara yang baru merdeka atau berkembang tersebut. Lembaga-lembaga

tersebut bekerja mulai dari mendefinisikan dan menentukan atau mengklasifikasikan apa yang dimaksud negara-negara berkembang sampai dengan memberikan bantuan keuangan dan teknis serta merancang program untuk kelompok negara-negara ini. Dengan demikian, ini merupakan instrumen untuk 'mengikat' negara-negara berkembang agar tetap berpihak atau tepatnya 'tergantung' pada negara-negara barat.

Pada tahun 1993, beberapa lembaga internasional memang telah menetapkan 28 negara yang termasuk dalam *transition countries*, yang sebelumnya disebut sebagai *centrally-planned economic system* (negara-negara komunis). Kelompok negara dalam transisi ini terdiri dari 15 negara bekas Uni Soviet dan 12 negara yang ada di Eropa Tengah dan Timur serta Mongolia. Kriteria yang dipakai untuk memasukan negara-negara tersebut sebagai negara dalam transisi adalah sangat sarat dengan ideologi dan politik yaitu karena negara tersebut adalah "*transitional state of their economies from a centrally administered system to one based on market principles*" (Nielsen, 2011: 17). Kategori ini jelas menyesatkan karena bertentangan dengan kategori yang umumnya dipakai yaitu tingkat pembangunan ekonomi (misal pendapatan, HDI, dll.), bukan ideologinya.

KESIMPULAN

Pengklasifikasian negara-negara ke dalam negara berkembang atau negara maju dilakukan berdasarkan tingkat pembangunan sosial dan ekonominya, yaitu upaya untuk meningkatkan performa ekonomi, standar hidup, dan keadilan. Dalam konteks ini, kategori suatu negara untuk dianggap sebagai 'negara maju' masih sangat ditentukan berbagai indikator atau gabungan indikator pembangunan dari negara-negara maju. Akan tetapi, setiap negara, kelompok negara atau organisasi dan lembaga internasional menerapkan pendekatan terhadap pembangunan yang berbeda. Dalil pengelompokan tersebut seringkali tidak berdasarkan kriteria yang jelas, melainkan lebih banyak berdasarkan pertimbangan politik dan ideologi.

Pendekatan yang berbeda (secara operasional dan praktikal) dalam konteks negara berkembang disebabkan setiap aktor memiliki mandat, misi, dan tujuan berbeda. Ada hubungan erat antara konsep pembangunan dan

hubungan kekuasaan dalam politik internasional. Dengan kata lain, konsepsi pembangunan seperti yang kita pahami dalam suatu periode sejarah tertentu sangat dipengaruhi oleh kekuasaan dan budaya yang dominan pada periode itu.

Pengklasifikasian kelompok negara tidak bisa dilakukan berdasarkan indikator ekonomi semata atau hanya berdasarkan kepentingan ideologi dan politik. Seperti dikatakan oleh Myrdal, Seers, dan banyak ahli lainnya, pembangunan adalah suatu konsep normatif meliputi nilai-nilai dan pilihan dasar, bukan konsep kuantitatif matematis ekonomi semata. Dari perspektif ini, konsepsi pembangunan, pengklasifikasian dan bantuan terhadap negara-negara berkembang diletakan pada dasar kepentingan kemanusiaan yang lebih luas, untuk memenuhi keadilan dan perdamaian positif bagi seluruh umat manusia. Di samping itu, negara-negara berkembang seharusnya mendapat ruang untuk menentukan pilihan, format, dan konsep pembangunan yang sesuai dengan kepentingan mereka.

Baik negara-negara maju dan negara-negara berkembang dewasa ini telah mengalami keterbukaan dan ketergantungan dalam bidang perdagangan, investasi, dan sistem perekonomian dunia. Sehingga hampir tidak ada pilihan kecuali untuk saling bekerja sama. Walaupun proses konseptualisasi dan praktis beragam antara satu/kelompok negara atau organisasi internasional, namun kebanyakan pengklasifikasian tersebut mempunyai tujuan sama yaitu mengurangi kemiskinan dan keterbelakangan, meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial, meningkatkan kesehatan dan pendidikan, serta mengembangkan kebebasan politik dan sosial. Oleh karena itu, perbedaan atau pengelompokan negara-negara dunia menjadi *developing countries* dan *developed countries* menimbulkan pertanyaan; apakah masih relevan dan diperlukan sekarang ini?

CATATAN BELAKANG

¹ Untuk detail pengklasifikasian yang berujung pada penggunaan istilah-istilah seperti tersebut di atas lihat misalnya, <http://www.unitar.org/resource/sites/unitar.org.resource/files/document-pdf/GA-2767XXVI.pdf>, atau UN Office of the High Representative for the Least Developed Countries, Landlocked Developing Countries and Small Island Developing States: <http://unohrrls.org/about-lidcs/criteria-for-lidcs/>

² Untuk detail pengklasifikasian yang berujung pada

- penggunaan istilah-istilah semacam ini lihat misalnya, <http://www.unitar.org/resource/sites/unitar.org.resource/files/document-pdf/GA-2767-XXVI.pdf>, atau UN Office of the High Representative for the Least Developed Countries, Landlocked Developing Countries and Small Island Developing States: <http://unohrls.org/about-ldcs/criteria-for-ldcs/> website dan United Nations Conference on Trade and Development, Palais des Nations, 8-14, Av. de la Paix, 1211 Geneva 10, Switzerland.
- ³ Pearson, Lester B, *et al.*, *Partners in Development: Report of the Commission on International Development*, New York, Praeger Publishers, 1969. Seperti dimuat dalam Lynge Nielsen¹, *Classifications of Countries Based on Their Level of Development: How it is Done and How it Could be Done*, IMF Working Paper February 2011, Hal. 13.
 - ⁴ Lihat The United Nations Development Programme, *Human Development Report* dari 1990-2014.
 - ⁵ *Ibid.*
 - ⁶ T. Graydon Upton, US Executive Director to the World Bank, *Testimoni yang disampaikan di depan the Committee on Foreign Relations of the United States Senate*, March 18, 1960. Dikutip dari Mason and Asher (1973), hal. 39,
 - ⁷ Pidato Soekarno di depan American Association, Jakarta, 28 November 1956, dalam Imam Toto K. Rahardjo dan Herdianto WK, (eds.), *Bung Karno dan Tata Dunia Baru*, Jakarta, PT. Grasindo, 2001, hal.148.
- ## REFERENSI
- Abramovitz, M. (2014). *Thinking about Growth and Other Essays on Economic Growth and Welfare*. Chicago: University of Chicago Press.
- Adler, E. (2002). Constructivism and International Relations. Dalam B. A. Carlsnaes, & T. Risse-Kappen (Penyunt.), *Handbook of International Relations* (hal. 109). London: SAGE.
- Bell, C. (1987). Development Economics. Dalam *A Dictionary of Economics* (hal. 1). The New Palgrave.
- Charter of The United Nations: Preamble, UN Documents Gathering a body of global agreements. (2003). New York.
- Chenery, H., Ahluwalia, M., Bell, C., Duloy, J., & Jolly, R. (1974). *Redistribution with Growth*. London: Oxford University Press.
- Diamond, S. (2009). *In Search of the Primitive: A Critique of Civilization* (10th ed.). New Jersey: Transaction Publisher.
- Eby Hara, A. (2011). *Pengantar Analisis Politik Luar Negeri: Dari Realisme sampai Konstruktivisme*. Bandung: Nuansa.
- Fierke, K. M. (2007). Constructivism. Dalam T. Dunne, M. Kurki, & S. Smith (Penyunt.), *International Relations Theories: Discipline and Diversity* (hal. 168). New York: Oxford University Press.
- Folker, J. S. (2003). Constructivist Approaches. Dalam J. S. Folker, *Making Sense of International Relations Theory* (hal. 118). London: Lynne Reinner Publisher.
- Garritsen de Vries, M. (1986). *The IMF in a Changing World, 1945-1985*. Washington: International Monetary Fund
- Jackson, R. H. (2007). Social Constructivism. Dalam R. H. Jackson, & G. Sorensen (Penyunt.), *Introduction to International Relations, Theories and Approaches* (3rd ed., hal. 161-162). Oxford: Oxford University Press.
- Jackson, R., & Sorensen, G. (1999). *Introduction to International Relations*. Oxford: Oxford University Press.
- Kapoor, I. (2008). *The Postcolonial Politics of Development*. New York.
- Korotayev, A., & Zinkina, J. (2014). On the structure of the present-day convergence. *Campus-Wide Information Systems*, 31(2/3), 139-152.
- Kuznets, S. (1973, Juni). Modern Economic Growth, Findings and Reflection. *The American Economic Review*, 63(3).
- Leifer, M. (1983). *Indonesia's Foreign Policy*. Sydney.
- Mason, E. S., & Asher, R. E. (1973). *The World Bank since Bretton Woods*. Washinton D.C.: Brookings Institution Press.
- McColl, R. W. (2005). *Encyclopedia of World Geography*. New York: Golson Books Ltd.
- Newman, L. (2003). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (5th ed.). New York, Allyn and Bacon.
- Nielsen, L. (2011). *Classifications of Countries Based on Their Level of Development: How it is Done and How it Could be Done*. *IMF Working Paper, February*, hal. 17.
- Rao, D. S., & Ark, B. V. (Penyunt.). (2013). *World Economic Performance: Past, Present and Future*. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Limited.
- Punch, K. (2005). *Introduction to Social Research*, (2nd ed.). London, SAGE Publications.
- Sanford, J. E. (2003). *Developing Countries: Definitions, Concepts and Comparisons*. New York: Nova Science Publishers.
- Sauvy, A. (1952, August 14). *L'Observateur*, dikutip dari *Editor's note: Hans Rosling* (CNN).
- Seers, D. (1979). The Meaning of Development, with a Postscript. Dalam D. Seers, E. W. Nafziger, D. C. O'Brien, & H. Bernste (Penyunt.), *Development Theory: Four Critical Studies* (hal. 3). London: Frank Cass.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom* (1st ed.). New York: Oxford University Press.
- Standard Country and Area Codes Classifications (M49)*. (2014, Januari 15). Diambil kembali dari United Nations Statistics Division: Unstats.un.org
- Sullivan, A., & Sheffrin, S. M. (2003). *Economics: Principles in Action*. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Szirmai, A. (2000). *The Dynamics of Socio-Economic Development: An Introduction*. Cambridge: University Press.
- Weber, C. (2001). *International Relations Theory: A Critical Introduction* (3th ed.). London: Routledge.
- Wendt, A. (1992). Anarchy is what States Make of it: The Social Construction of Power Politics. *International Organization*, 46(2), 391-425.
- Wendt, A. (1999). *Social Theory of International Politics*. New York: Cambridge University Press.
- World Bank. (1997). *Documents and Reports*.
- World Bank. (1997). National Accounts Data, and OECD National Accounts Data Files; <http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD>.